

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2005

PT Inalum akan pasok listrik PLN

MEDAN (Bisnis); PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) bulan depan memasok arus listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar 90 MW untuk menambah kehandalan listrik di daerah ini.

Deputy Senior Manager Public Relation PT Inalum, S. S. Si-jabat, membenarkan bahwa perusahaan patungan Indonesia-Jepang itu akan memasok energi listrik kepada PT PLN Kitlur [Pembangkit dan Penyaluran] Sumbagut sebanyak 90 MW mulai bulan depan.

"Kami ingin membantu masyarakat Sumut mendapatkan penerangan. Selama ini listrik di daerah ini sering mati karena kekurangan arus," ujarnya kepada *Bisnis*, kemarin.

Menurut dia, bulan ini Inalum baru mampu memasok arus listrik ke PLN Kitlur Sumbagut 35 MW sampai 45 MW pada malam hari. PLN, kata dia, sudah memperbaiki penyambungan aliran listrik di PLTA Tangga, Porsea, Kab. Toba Samosir. (msi)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 30		TAHUN 2005

Kejati NTT Investigasi Kasus PLTS Alor

KUPANG, KOMPAS — Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melakukan investigasi terhadap dugaan penggelembungan harga pengadaan 1.200 unit pembangkit listrik tenaga surya di Alor oleh Womintra Foundation. Investigasi dilakukan setelah ada dugaan penyimpanan pada 700 unit dari total 1.200 unit.

Hal itu diungkapkan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) Hartadi di Kupang, Rabu (2/3). Dugaan penggelembungan harga pada 700 unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) itu merujuk hasil audit dan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah NTT di Kupang.

Hartadi tidak merinci seperti apa dugaan penggelembungan harga sesuai dengan hasil temuan BPKP NTT tersebut. Namun, Hartadi menyebutkan, proyek pengadaan dan pemasangan 1.200 unit PLTS di Alor itu dilakukan oleh Womintra Foundation Kupang dengan harga Rp 7,5 juta per unit.

Diakui pula, BPKP hanya mengaudit 700 unit PLTS yang dikerjakan dalam tahun ang-

garan 2002 dan 2003. Audit itu atas permintaan Gubernur NTT Piet Alexander Tallo, dan hasilnya telah diserahkan kepada Kejati NTT untuk diproses hukum.

Kejati, ujar Hartadi, telah meningkatkan status kasusnya ke penyidikan dan sudah menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan penggelembungan harga 700 PLTS. Karena diduga telah terjadi kasus yang sama pada proyek tahun 2004, yaitu menyangkut pengadaan 500 unit PLTS, kejati akan mengusutnya.

"Tetapi, pengusutan itu didahului oleh permintaan resmi kami kepada BPKP NTT agar mengaudit lagi proyek PLTS tahun 2004 itu. Dari hasil audit terhadap 700 unit terdahulu memang ada indikasi kerugian negara, seperti dilaporkan BPKP. Berapa besar kerugian itu, tidak perlu saya sebutkan," ungkapnya.

Hartadi membenarkan bahwa BPKP melakukan perbandingan harga pada merek yang sama, yakni seharga Rp 3,5 juta. Dengan demikian, angka hasil audit BPKP itu dapat dijadikan acuan bagi Kejati NTT, tetapi bukan satu-satunya.

Jika mengacu pada barang yang sama, yakni hanya Rp 3,5 juta, ujar Hartadi, artinya terlihat ada perbedaan besar dengan PLTS yang dipasang Womintra, yakni Rp 7,5 juta per unit. "Tetapi, sekali lagi, temuan BPKP itu hanya sebagai acuan, pembuktiannya nanti lihat di pengadilan," paparnya.

Audit ulang

Kuasa hukum Womintra, Nicholay A. Bengungu, mengemukakan, Kejati NTT tidak dapat dipersalahkan jika hanya menerima keterangan atau temuan dari BPKP. Namun, kejati tidak boleh menerima secara mentah laporan dari BPKP yang belum terbukti kebenarannya, bahkan hasil rekayasa BPKP sendiri.

"Untuk itu, kami meminta Kejati NTT mengambil tindakan hukum, seperti melakukan audit ulang secara keseluruhan dengan menggunakan auditor independen dan atau auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan, bukan BPKP. Juga menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah," ujarnya.

Ia juga meminta Kejati NTT agar mengekspos setiap temuan secara transparan, adil, jujur, dan berimbang. (CAL)

2